



POLITIK PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI

(TINJAUAN EKONOMI POLITIK : PELAKSANAAN POLITIK PANGAN DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN)

KK

Fis P 08/01

And

P

SKRIPSI



OLEH :

LUSI ANDRIYANI

NIM : 079615093

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

2000

POLITIK PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI

**(TINJAUAN EKONOMI POLITIK : PELAKSANAAN POLITIK PANGAN DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

OLEH :

LUSI ANDRIYANI

NIM : 079615093

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

2000

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Siap Diujikan

Surabaya, 01 Desember 2000

Dosen Pembimbing



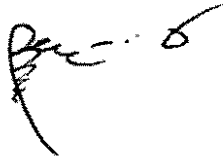
Dra. Siti Aminah, MA
NIP. 131 836 624

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan komisi penguji pada tanggal 6 Desember Tahun 2000.

Komisi Penguji terdiri dari :

Ketua



Drs. Harvadi, Msi
NIP. 131 653 466

Anggota :



Dra Siti Aminah, MA
NIP. 131 836 624



Drs. Privatmoko, MA
NIP. 130 937 952

ABSTRAKSI

Nama	:	Lusi Andriyani
NIM	:	079615093
Judul Skripsi	:	Politik Pangan Dan Kesejahteraan Petani Tinjauan Ekonomi Politik : Pelaksanaan Politik Pangan Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan).
Jumlah Halaman	:	120 Halaman (Bab I:43, Bab II:10,BabIII:14 Bab IV:48, Bab:V: 4). Daftar Pustaka: 4 Hal, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Persembahan, Kata Pengantar:3Hal, Daftar isi : 3 Hal, Daftar Tabel, Daftar Bagan, Abstrasi:2Hal, Lampiran.
Daftar Pustaka	:	31 Buku, 6 Jurnal, 43 Kliping Majalah Dan Koran : (20 Kompas, 2 Surya, 4 Surabaya Post, 1 Suara Pembaharuan, 15 Gatra, 1 Kontan).

Krisis pangan yang terjadi di Indonesia sangat menarik. Fenomena ini dapat dilihat di berbagai daerah di wilayah Indonesia pada pertengahan tahun 1998. Harga beras yang melambung telah menyebabkan masyarakat tidak mampu lagi untuk membeli beras. Dengan keadaan seperti ini pemerintah berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dengan cara melakukan impor beras, serta membuat kebijakan tentang distribusi beras dan kebijakan harga dasar gabah yang dikeluarkan melalui Inpres No 32 tahun 1998. Penelitian ini menyoroti masalah pelaksanaan politik pangan dan ada tidaknya hubungan politik pangan dengan peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan. Untuk menjelaskan pelaksanaan politik pangan dan kesejahteraan petani menggunakan kerangka pemikiran dengan pendekatan ekonomi politik, yang merupakan penerapan dari cara pendekatan yang bersumber pada teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik yang terjadi pada situasi krisis ekonomi di Indonesia secara umum dan di Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan secara khusus.

Tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, dengan teknik penarikan sampel purposive sampling. Sampel yang diambil dengan pertimbangan tertentu dan diharapkan dapat menjangkau informasi dari berbagai sumber. Penelitian yang mengambil lokasi di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan untuk mengolah data adalah diskriptif kualitatif untuk mendiskripsikan secara mendalam tentang permasalahan politik pangan

dalam hal ini beras dan kesejahteraan petani yang diinterpretasikan dan kemudian dipaparkan secara naratif.

Daerah kabupaten Lamongan merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur yang tergabung di dalam Sub Dolog wilayah III Bojonegoro. Kecamatan Glagah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan sebagai penghasil padi. Dapat dilihat dari struktur matapencaharian penduduk yang mayoritas sebagai petani. Begitu juga dengan struktur pemilikan tanah lihat tabel 13. Dan hasil padi pada tabel 14. Dalam pelaksanaan politik pangan di dapat data bahwa pengadaan pangan dan distribusi hasil pertanian padi di Kecamatan Glagah tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurang berperannya KUD sebagai alat untuk menampung padi dari petani. Serta kebijakan penghapusan subsidi pupuk 60% oleh Pemerintah. Adanya beras Impor yang masuk melalui OPK semakin memperparah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan harga dasar gabah yang dikeluarkan melalui Inpres No.32 Tahun 1998 juga belum dinikmati oleh petani. Belum dinikmatinya harga dasar oleh petani karena sistem pemasaran ke tengkulak dan penentuan harga oleh pasar. Juga disebabkan karena tidak adanya kontrol dari pemerintah terhadap harga dasar gabah yang berlaku di masyarakat.

Dengan melihat pelaksanaan politik pangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan petani hanya bersifat parsial dan tidak menyentuh obyek sasaran (petani). Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tersebut hanya sebagai retorika politik saja.